



Acer



RENSTRA
(RENCANA STRATEJIK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KERTAJATI
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024-2026

Jalan Raya Kadipaten – Jatitujuh Telp. (0233) 662620 Kertajati 45457

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Institusi Pemerintah yang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertajati Tahun 2024-2026 sebagai salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kertajati Tahun 2024-2026 ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Rencana Strategis Kecamatan Kertajati Tahun 2024-2026 sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu bentuk perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.

Akhirnya melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi, baik Pemerintah maupun Swasta yang membutuhkannya.

Kertajati, Desember 2022

CAMAT KERTAJATI

H. TRIS SUSENO. S.Sos., M.MKes.

Pembina Tk. I

NIP. 19650518 198903 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
I.1	Latar Belakang	1
I.2	Landasan Hukum	2
I.3	Maksud dan Tujuan	8
I.4	Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
II.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	14
II.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	47
II.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	53
II.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	60
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	62
III.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah	62
III.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
III.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD	67
III.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	67
III.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	69
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	71
IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	71
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	75
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	105
BAB VIII	PENUTUP	107

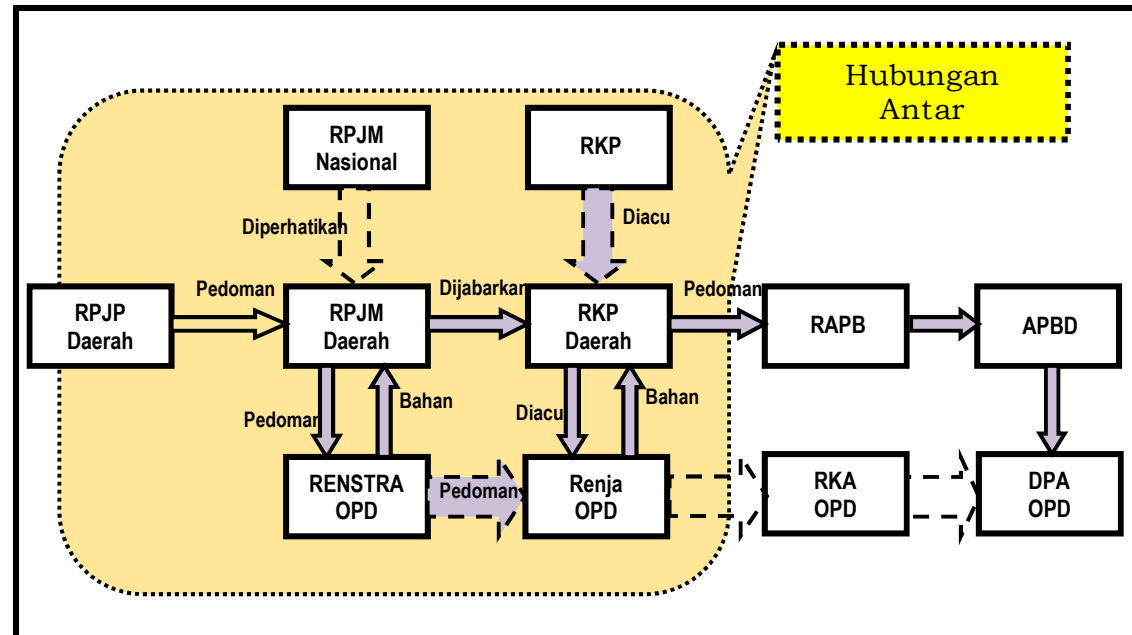
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kecamatan Kertajati sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun urusan-urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai fungsinya terdiri dari :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Gambar 1.1

**HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KERTAJATI DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kertajati Tahun 2024-2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang PENDAHULUAN I-11 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka PENDAHULUAN I-13 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lampiran Daerah

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 252) PENDAHULUAN I-14

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kertajati dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanananaan dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Kertajati pada setiap tahun anggaran, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan yang hendak di capai adalah agar:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang merupakan dukungan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka dari Kecamatan Kertajati untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Kecamatan Kertajati.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kertajati Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud

pengembangan pelayanan Kecamatan Kertajati, Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI KECAMATAN KERTAJATI

meliputi, Idenstifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kertajati, telaah renstra K/L dan Renstra Kecamatan Kertajati, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategi, penentuan isu-isu Strategi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

meliputi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kertajati serta hubungan tujuan dan sasaran Kecamatan Kertajati dengan tujuan dan sasaran RPD serta cascading kinerja kecamatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Meliputi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kertajati

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

selama kurun waktu tiga tahun.

2.1.1 Tugas

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2016 tentang uraian tugas unsur penunjang dilingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

d. pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

2.1.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2.1.1.2 Sekretaris

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian

2.1.1.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

2.1.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.1.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

2.1.2 Fungsi

2.1.2.1 Camat

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.
2. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan

2.1.2.2 Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan

1. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.2.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.2.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

pemerintahan dan pelayanan umum

2.1.2.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;

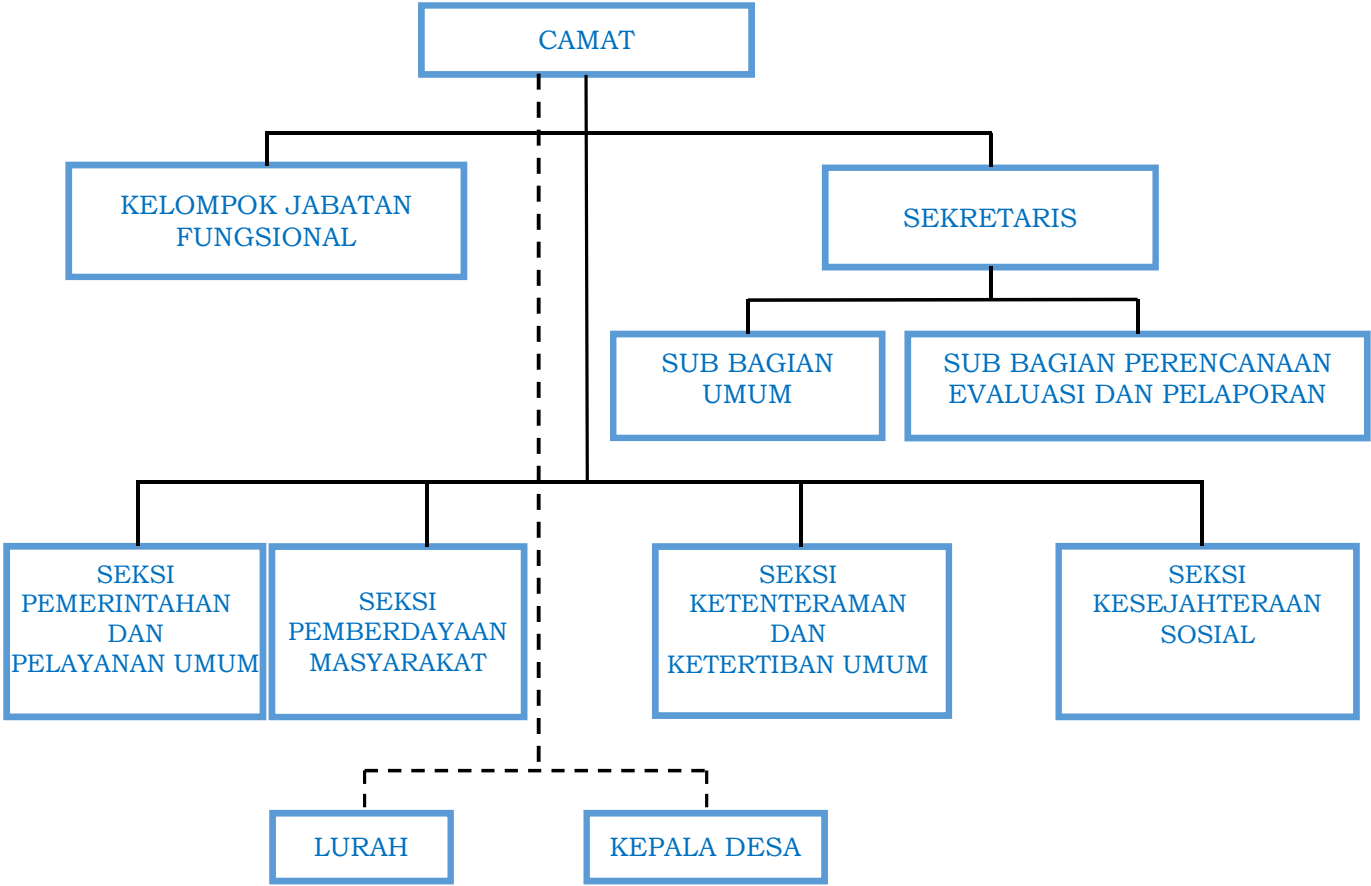
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan

3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Kertajati

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Gambar 2.1.
BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
KECAMATAN KERTAJATI



2.2 Sumber Daya Kecamatan Kertajati

2.2.1 Letak Geografis dan Kondisi Sumber Daya Alam

Kecamatan Kertajati merupakan salah satu dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka yang memiliki luas wilayah 138,36 Ha atau 11,48% luas wilayah Kabupaten Majalengka. Luas wilayah Kecamatan Kertajati ini merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Majalengka. Ketinggian Kecamatan Kertajati sekitar 30 m diatas permukaan laut.

Secara geografis Kecamatan Kertajati terletak pada koordinat 108° 03' sampai dengan 108° 15' Bujur Timur dan 6° 37' sampai dengan 6° 46' Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kecamatan Panyingkiran adalah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jatitujuh;
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dawuan;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kadipaten;
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu.

Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Desa terjauh 10 Km, jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten 25 Km, jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah ± 95 Km serta jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Negara adalah ± 200 Km.

Suhu di Kecamatan Kertajati berkisar antara 22°C sampai dengan 30°C. Bentuk wilayah Kecamatan Kertajati sepenuhnya datar sampai berombak, keadaan tanah tergolong subur sehingga tidak heran jika masyarakatnya sebagian besar mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian.

2.2.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah

Secara administratif pada akhir tahun 2010 Kecamatan Kertajati terdiri dari 13 Desa, dan di tahun 2011 Kecamatan Kertajati berubah menjadi 14 Desa dengan desa pemekaran yaitu Desa Sahbandar yang merupakan desa pemekaran dari Desa Mekarjaya. Seiring dengan pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Kertajati yang mengakibatkan ada sebagian wilayah di beberapa desa yang di bebaskan tanah kepemilikannya diantaranya Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Bantarjati, Desa Sukamulya dan Desa Sukakerta. Untuk Pembangunan Jalan Tol, desa yang sebagian dibebaskan

kepemilikannya yaitu Desa Palasah, Desa Mekarjaya.

Pada tahun 2016 ada perubahan penurunan jumlah pemerintahan berdasarkan satuan Dusun, RT dan RW, ada beberapa dusun yang hilang dari beberapa desa diantaranya Dusun Cintakarya di Desa Kertajati, Dusun Sukasari di Desa Kertajati dan Dusun Sukahayu di Desa Babakan.

Adapun jumlah Dusun, RT dan RW yang ada di Kecamatan Kertajati dapat kami jelas dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Banyaknya Dusun, RT dan RW Kecamatan Kertajati

No	Desa	Dusun	RW	RT
1.	Mekarjaya	7	7	20
2.	Palasah	3	7	14
3.	Pakubeureum	4	4	13
4.	Sukawana	3	9	18
5.	Kertawinangun	3	3	16
6.	Babakan	5	7	18
7.	Kertajati	5	7	9
8.	Kertasari	4	4	18
9.	Mekarmulya	2	2	8
10.	Sukamulya	3	8	18
11.	Bantarjati	2	3	8
12.	Pasiripis	4	4	8
13.	Sukakerta	3	4	8
14.	Sahbandar	2	2	6
	JUMLAH :	50	71	182

2.2.3 Keadaan Aparatur di Kantor Kecamatan Kertajati

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kertajati

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kertajati terdiri dari 17 orang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari jabatan struktural (Esselon III dan IV) serta Fungsional Umum. Untuk lebih jelasnya komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kertajati dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Pegawai Kecamatan Kertajati berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2022

NO	Pangkat (Golongan)	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Tk. I (IV/a)	1
2.	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	2
4.	Penata (III/c)	1
5.	Penata Muda TK. I (III/b)	5
7.	Penata Muda (III/a)	1
8.	Pengatur (II/d)	2
9.	Pengatur Muda TK. I (II/b)	1
10.	Juru Muda TK (I/c)	1
Jumlah		17

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kertajati Tahun 2018

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Kertajati berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2022

NO	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah Pegawai
1.	Esselon IIIa	1
2.	Esselon IIIb	1
3.	Esselon Iva	4
4.	Esselon IVb	2
5.	Fungsional Umum	9
	Jumlah	17

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kertajati Tahun 2022

Tabel 2.4
Pegawai Kecamatan Kertajati Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

NO	Pendidikan	Status Kepegawaian			Total	%
		PNS	CPNS	TKK		
1	SMP	1			1	6,00
2	SMA	4			4	24,00
3	D3	1			1	6,00
4	S1	9			9	53,00
5	S2	2			2	11,00
	Jumlah	17			17	100,00

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kertajati Tahun 2022

2.2.4. Sarana dan prasarana Kecamatan Kertajati

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kertajati

SPESIFIKASI			Bahan	Asal/Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.SP.D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin						
Tanah Perkantoran	-		Tanah	Hibah	1966	-	-	B
Genset	AVG		Besi	APBD II	2016		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3387 U	Besi	Pembelian	2004		Unit	B
Sepeda Motor	NF 100 TD / Revo	E 3818 U	Besi	Pembelian	2008		Unit	B
Sepeda Motor	NF11B1DM / Revo	E 3985 U	Besi	Pembelian	2009		Unit	B
Sepeda Motor	NF 11B1D / Revo	E 4076 U	Besi	Pembelian	2010		Unit	B
Sepeda Motor	NF11C1C M/T Blade	E 4708 U	Besi	HADIAH PBB	2012		Unit	B
Sepeda Motor	Vario / NC12AF2CBI A/T	E 4922 U	Besi	Bantuan Prop	2014		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3218 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3219 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3220 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3221 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3222 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B

Sepeda Motor	Win / MCB	E 3223 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3224 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3225 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3226 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3227 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3228 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3229 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	Win / MCB	E 3230 U	Besi	Bantuan Prop	2003		Unit	B
Sepeda Motor	NF 125 SD/Supra X	E 3761 U	Besi	Pembelian	2007		Unit	B
Sepeda Motor	NF 100 TD / Revo	E 3852 U	Besi	Pembelian	2008		Unit	B
Sepeda Motor	NF 100 TD / Revo	E 3853 U	Besi	Pembelian	2008		Unit	B
Sepeda Motor	NF 11B1DM / Revo	E 4083 U	Besi	Pembelian	2010		Unit	B
Sepeda Motor	NF 11B1DM / Revo	E 4084 U	Besi	Pembelian	2010		Unit	B
Sepeda Motor	M/T / CS ONE	E 4113 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	M/T / CS ONE	E 4127 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	M/T / CS ONE	E 4164 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	M/T / CS ONE	E 4166 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	M/T / CS ONE	E 4202 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B

Sepeda Motor	M/T / CS ONE	E 4233 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	Juviter / MX	E 4337 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	Juviter / MX	E 4367 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	Juviter / MX	E 4398 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	Juviter / MX	E 4414 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	Juviter / MX	E 4437 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	Juviter / MX	E 4482 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Sepeda Motor	Juviter / MX	E 4552 U	Besi	Bantuan Prop	2011		Unit	B
Teralis	-		Besi	Pembelian	2005		Buah	B
AC	Panasonic/ TCL		Mika	Pembelian	2006		Buah	B
AC	LG 1 PK Model S.09LT		Mekanik	Pembelian	2012		Buah	B
AC	Sharp		Mika	Pembelian	2015		Buah	B
AC	LG 2 PK		Besi	Pembelian	2017		Buah	B
Bacground rapat			Kayu	APBD II	2018		Buah	B
Bangunan Aula			semen	pemda	2017		Buah	B
Bangunan Gedung Kantor	-		semen	pemda	2017		Unit	B
Bangunan Halaman dan Pavingblock			Paving	BMCK	2018		Unit	B
Bangunan Halaman Parkir Aspal	-		Aspal	Pemda	2017		Unit	B
Bupet	-		Stainles	Pembelian	2017		Buah	B
Digital Parabola	Tanaka		Besi	Pembelian	2015		Buah	B
Dispenser	Kris		Plastik	APBD II	2018		Buah	B
Faksimili	Sony		Mika	Pembelian	2017		Buah	B
Filling Kabinet	Krisbow		Stainles	APBD II	2017		Buah	B

Genset	Honda EP		Besi	Pembelian	2011		Buah	B
Handycam	Sony		mika	Pembelian	2013		Buah	B
Instalasi Listrik				Pembelian	2009		Paket	B
Instalasi Listrik				Pembelian	2011		Paket	B
Kipas Angin	Krisbow		Stainles	APBD II	2012		Buah	B
Komputer	Simbadda		Mika	Pembelian	2012		Unit	B
Komputer	Lenovo		Mika	Pembelian	2021		Unit	B
Komputer PC	Simbada		Mika	Pembelian	2010		Unit	B
Komputer/PC	Asus		Mika	APBD II	2018		Unit	B
Komputer/PC	Asus		Mika	Pembelian	2019		Unit	B
Kulkas / Lemari Es	LG		Mekanik	Pembelian	2011		Unit	B
Kursi Kerja Camat	-		Jok	APBD II	2017		Buah	B
Kursi Kerja Putar Camat			Jok	APBD II	2016		Buah	B
Kursi Kerja Putar Kasi	-		Jok	APBD II	2016		Buah	B
Kursi Kerja Putar Kasi			Kayu	APBD II	2015		Buah	B
Kursi Putar	Lupo		Besi	Pembelian	2006		Buah	B
Kursi Putar	Brother		Besi	Pembelian	2015		Buah	B
Kursi putar	Frontline		Jok	APBD II	2018		Buah	B
Kursi Sice			Kayu	Pembelian	2006		Buah	B
Kursi Sofa			Jok	APBD II	2017		Buah	B
Kursi Tunggu			Stainles	APBD II	2016		Buah	B
Komputer	NOC		Mika	APBD II	2016		Buah	B
Lemari	5.76		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Lemari	Credenza 120/40/85		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Lemari	Credenza 200/40/85		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Lemari	Credenza 200/40/85		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Lemari	Credenza		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Lemari Arsip	Krisbow		Stainles	APBD II	2017		Buah	B
Lemari Arsip	120/50/240		Kayu	APBD II	2017		Buah	B

Lemari arsip	Krisbow		Kayu	APBD II	2018		Buah	B
Lemari Arsip Besi	Krisbow		Besi	APBD II	2016		Buah	B
Lemari Backround	80/40/240		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Lemari Makan			Kayu	Pembelian	2014		Buah	B
Lemari Pakaian			Kayu	Pembelian	2010		Buah	B
Lemari Piala			Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Lemari Tv	Credenza		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja (Counter) Pelayanan	285/60/110		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja 1/2 Biro			Kayu	Pembelian	2013		Buah	B
Meja Kerja	140/60/78		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Kerja	160/70/75		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Kerja	120/60/75		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Kerja	180/90/75		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Kerja	120/60/75		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja kerja	160/75/75		Kayu	APBD II	2018		Buah	B
Meja kerja	120/60/75		Kayu	APBD II	2018		Buah	B
Meja Kerja			Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Kerja Camat	200/100/75		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Kerja Kasi			Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Kerja Kasi Biro			Kayu	APBD II	2016		Buah	B
Meja Kerja Sekcam	180/90/75		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Komputer			Stainles	APBD II	2017		Buah	B
Meja Kursi Tamu/Sofa			Kayu	Pembelian	2009		Buah	B
Meja Rapat			Kayu	Pembelian	2014		Buah	B
Meja Rapat			Stainles	APBD II	2017		Buah	B
Meja Rapat			Kayu	APBD II	2018		Buah	B
Meja Resepsionis	900/60/110		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Samping	90/40/60		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Samping	90/40/60		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Samping	90/40/60		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Samping	90/40/60		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Samping	90/40/60		Kayu	APBD II	2017		Buah	B

Meja Samping Camat	100/40/65		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Samping Sekcam	90/40/60		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Security	120/60/77		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Tamu	180/90/75		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Meja Tamu	90/40/60		Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Mesin Babad Rumput Dorong	Tasco		Mekanik	Pembelian	2012		Buah	B
Mesin Penghancur Kertas	Krisbow		Mika	APBD II	2018		Buah	B
Mesin Potong Rumput	Teger		Mekanik	Pembelian	2006		Buah	B
Mimbar Podium			Kayu	Pembelian	2014		Buah	B
Note Book	Acer		Mika	APBD II	2015		Unit	B
Pagar Belakang Kantor			Beton	Pemda	2015		Buah	B
Pagar Depan Kantor			Beton	BMCK	2018		Buah	B
Partisi			Baja/Kaca	BMCK	2017		Buah	B
Podium			Kayu	APBD II	2016		Buah	B
Printer	Canon		Mika	APBD II	2018		Unit	B
Proyektor	Sonic		Mika	Pembelian	2009		Unit	B
Proyektor	Sony		Mika	Pembelian	2016		Unit	B
Radio HF/FM(Handy Talkie)	Alinco		Mika	Pembelian	2019		Unit	B
Rak Arsip			Kayu	Pembelian	2014		Buah	B
Rolling Door			Besi	Pembelian	2011		Buah	B
Running Teks			Campur	APBD II	2018		Buah	B
Sofa			Jok	Pembelian	2012		Buah	B
Sofa			Jok	APBD II	2016		Buah	B
Sofa			Kayu	APBD II	2017		Buah	B
Soud System dan peralatannya	Huper		Mika	Pembelian	2014		Unit	B

Soud System dan peralatannya	Sony		Mika	Pembelian	2017		Unit	B
Sound System	Shure		Mika	Pembelian	2019		Unit	B
Tanaman Hotikultura	Mangga		Kayu	Pembelian	2010		Buah	B
Tape Audio Wireles	Tens KE7900		Mika	Pembelian	2007		Buah	B
Televisi	LG		Mekanik	Pembelian	2011		Buah	B
Televisi	LG 52"		Mekanik	APBD II	2016		Unit	B
Televisi	LG 42"		Mekanik	APBD II	2016		Unit	B
Tempat Tidur			-	Pembelian	2010		Unit	B
Teralis			Besi	Pembelian	2005		Buah	B
Teralis			Besi	Pembelian	2015		Buah	B
Tralis Jendela	100 M		Besi	Pembelian	2018		Buah	B
Penambahan 2020								
Sofa			Jok	SETDA	2020		Set	B
Meja Tamu			Kayu	SETDA	2020		Buah	B
Dispenser	Kris		Campur	SETDA	2020		Buah	B
Layar OHP	Orca		Mika	Pembelian	2013		Buah	B
Penambahan 2021								
Scanner	Canon		Mika	Pembelian	2021		Unit	B
Komputer PC	Lenovo		Mika	Pembelian	2021		Unit	B
Lemari Arsip			Besi	Pembelian	2021		Unit	B
Kulkas	Polytron		Campuran	Pembelian	2021		Unit	B
Penambahan 2022								
CCTV	Dahua		Mika	Pembelian	2022		Unit	B
Sofa			Jok	Pembelian	2022		Unit	B
CCTV	Dahua		Mika	Pembelian	2022		Unit	B

Pelayanan Kecamatan Kertajati

Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertajati

SPM/Stand ar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
meningkatkan ya kualitas pelayanan public	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	76	77	77.5	78	79	79.25	78.55	84	100		104.28	102.01	108.39
Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100	100.	100
	Jumlah Desa yang meningkat status perkembangann ya	10	10	10	10	10	10	10	15	15		100	100.	150
	Jumlah desa Teamatik	15	15	15	15	15	15	15	15	15		100	100.	100

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Kertajati

Kategori	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan		
	2019	2019	2019	Anggaran	Realisasi	
Sumber Daya	256.612.250,00	241.258.653,00	94,02			
Sarana dan Publik	10.000.000,00	7.500.000,00	75			
Sial	19.425.500,00	19.425.000,00	100			
rga Kecil Bahagia	19.400.000,00	18.070.000,00	93,14			
Karakter Melalui an Non Formal	19.024.500,00	19.024.500,00	100			
Dasar	19.437.500,00	19.367.500,00	100			
Kompetensi	47.397.500,00	47.397.500,00	100			
Sumber Daya	29.850.000,00	28.900.000,00	100			
Produksi dan	19.160.000,00	19.160.000,00	100			
an Sistem Kinerja	297.139.375,00	292.580.502,00	100			
	737,446,625,00	712,684,155	96,64			

	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	3	8	13	17	18
ADMINISTRASI AN	221.346.300,00	214.163.220,00	96,75		
SARANA DAN ECAMATAN	54.860.350,00	54.817.850,00	99,92		
NCANA, LUASI SERTA ERJA	18.271.900,00	18.271.900,00	100,00		
DAN FASILITASI MERINTAHAN ETERTIBAN	0	0			
ERINTAHAN	0	0			
NGAN	0	0			
AN POTENSI	0	0			
ANGUNAN DAN YAHAN	27.000.000,00	26.820.000,00	99,33		
PERAN	69.331.450,00	69.331.450,00	100,00		
	1.205.492.000,00	1.118.761.266,00	92,81		
	1.596.302.000,00	1.502.165.586,00	94,10		

RENSTRA KECAMATAN KERTAJATI TA

Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran
4	5	6	9	10	11	14	15	16	17
2.406.213.707	2.880.891.351	2.716.603.188	2.382.041.208	2.698.509.413		98,99			
69.160.600	74.545.000	44.710.000	57.076.500	73.795.000		82,53			
56.805.000	30.735.280	19.345.000	51.555.000	29.985.280		90,76			
17.092.136	20.052.000	18.136.900	13.492.136	20.052.000		78,94			
13.900.000	82.575.000	95.100.000	13.900.000	76.575.000		100			
186.430.670	53.795.400	135.430.000	180.429.415	50.795.400		96,78			
2.749.602.113	3.142.594.031	3.029.325.088	2.698.494.259	2.949.712.093	0	98,14	0	0	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kertajati

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pembangunan daerah di Kecamatan Kertajati diantaranya adalah:

1. Tantangan internal

Masih kurang meratanya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal, serta masih kurang memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur pemerintah Kecamatan Kertajati, sehingga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

2. Tantangan Eksternal

Pada saat ini Kecamatan Kertajati lebih berkembang sebagai pusat pendidikan dan perekonomian, sehingga merupakan tantangan tersendiri bagi Kecamatan Kertajati untuk mengantisipasi supaya kegiatan perekonomian dan pendidikan dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan perekonomian dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu aktivitas pendidikan serta mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Kertajati, serta semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut pelaksanaan pelayanan yang lebih berkualitas. Keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat dan kawasan Aerocity kertajati serta konektivitas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), dan Umroh Park akan merubah paradigma Kabupaten Majalengka menuju kota metropolitan dan kawasan industri baru akan berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga menuntut kesiapan masyarakat Kecamatan Kertajati dalam peningkatan kualitas sarana prasarana publik, pelayanan publik dan kondisi kamtibmas yang memadai.

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Kertajati dalam pencapaian tujuan antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengembangkan kawasan yang berdasar pada komoditas unggulan;
3. Akses informasi yang lebih cepat, sehingga mudah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Dengan adanya Bandara Internasional Jawa Barat, Kecamatan Kertajati sebagai Pintu Gerbang Kabupaten Majalengka, merupakan peluang Kecamatan Kertajati untuk lebih mempercepat pertumbuhan wilayah ;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai ;
Semakin luasnya lapangan pekerjaan, dimana merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan dan kesempatan kerja bagi usia produktif untuk meningkatkan tarap hidup.

2.4.2 Peluang

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Kertajati dalam pencapaian tujuan antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

2. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengembangkan kawasan yang berdasar pada komoditas unggulan;
3. Akses informasi yang lebih cepat, sehingga mudah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Dengan adanya Bandara Internasional Jawa Barat, Kecamatan Kertajati sebagai Pintu Gerbang Kabupaten Majalengka, merupakan peluang Kecamatan Kertajati untuk lebih mempercepat pertumbuhan wilayah ;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai ;

Semakin luasnya lapangan pekerjaan, dimana merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan dan kesempatan kerja bagi usia produktif untuk meningkatkan taraf hidup.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Kertajati dalam pencapaian dukungan terhadap Misi diantaranya :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Kertajati dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Kertajati untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;

3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kertajati;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kertajati, terutama dilihat dari posisi Strategi wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Kertajati.
6. Sumber Daya Alam mendukung untuk meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil telaah Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Kertajati pada RTRW Kabupaten Majalengka bahwasanya Kecamatan Kertajati masuk pada golongan Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala perkotaan atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Kertajati akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan wisata, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan

perikanan.

Sedangkan berdasarkan hasil telaah Pola ruang wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka berpotensi sebagai Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Pertanian Lahan Kering, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertajati dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi OPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan merupakan organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah :

1. Koordinasi antar UPTD belum dapat dilakukan secara maksimal
2. Sarana prasarana penunjang kegiatan sangat kurang seperti kendaraan Dinas baik Roda Empat maupun Roda Dua
3. Tata kearsipan belum teratur secara maksimal, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen dan SDM.
4. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Kertajati belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
5. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;

6. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Kertajati masih terbatas;
7. Sering terjadi gangguan jaringan Internet sehingga pelayanan administrasi Kependudukan menjadi terganggu;

Permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan OPD sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor diluar kewenangan OPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan. Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Kertajati diantaranya adalah :

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

- a. Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan
- b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal
- c. Secara kualitatif SDM aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan
- d. Masih kurangnya jumlah karyawan kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya sarana dan prasarana berupa kelengkapan administrasi perkantoran
- b. Kurangnya sarana dan prasarana berupa Peralatan Kerja
- c. Kurangnya fasilitas untuk operasional pelayanan bagi pegawai

- d. Kurang lengkapnya faktor penunjang lingkungan kantor untuk melaksanakan pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi :

1. Terdapat perubahan ketentuan yang berupa peraturan perundang undangan yang harus menjadi acuan untuk menyusun dan menetapkan serta menentukan kebijakan kewilayahan terhadap rencana program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan yang berimplikasi terhadap target kinerja Perangkat Daerah;
2. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan
3. Terdapat bagian wilayah dari pedesaan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya dengan kondisi sarana jalan yang kurang baik
4. Kadang kurang tepatnya sasaran pemberian bantuan dari Pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan dari yang lainnya Hal ini mengakibatkan nilai kebersamaan dan kegotong royongan berkurang dan ada anggapan biar yang ikut dalam kegiatan gotong royong pun yang mendapat bantuan saja.
5. Sarana dan prasarana transportasi kondisinya sudah ada yang rusak.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertajati lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Analisis Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
nya pelaksanaan reformasi gkungan Kecamatan Kertajati. am pelaksanaannya adalah penyelenggaraan pemerintahan an bebas korupsi, kolusi dan ningkatnya kualitas pelayanan a masyarakat; meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur camatan Kertajati	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perar 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan D 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ca 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Lap 11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 12. Penyediaan Komponen Instalasi L 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan K 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggan

			17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat undangan 18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Ko 19. Pengadaan Mebel 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pe Kantor atau Bangunan Lainnya 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Da 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pe dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion 25. Pemeliharaan Mebel 26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanto Lainnya
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerin Kecamatan 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepa Kecamatan 3. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Sta Minimal di Wilayah Kecamatan 4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan P Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

nya Pemberdayaan Masyarakat ngungkit potensi unggulan desa matan Kertajati. tan adalah menyelenggarakan pemerintahan, yang salah satu h mengkoordinasikan kegiatan masyarakat sehingga bisa Ekonomi Pedesaan sesuai ulan desa, Dengan semakin a tingkat kehidupan masyarakat ai bidang yang berbanding n nilai-nilai luhur dan kearifan miliki masyarakat Kecamatan g semakin lama semakin diantaranya semangat dan gotong royong, maka untut untuk lebih meningkatkan m peningkatan pemberdayaan am pelaksanaan pembangunan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerin Wilayah Kerja Kecamatan 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberd di Wilayah Kecamatan
nya penguatan kapasitas kinerja ntahan desa dan kualitas serta ana prasarana infrastruktur nya Undang-undang Nomor 6 entang Desa, maka salah satu	Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan Peningkatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala De Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala D 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pem dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi,

atan yang perlu ditingkatkan aan terhadap penyelenggaraan desa. Dengan pembinaan yang al oleh kecamatan bersama lain, diharapkan dapat kapasitas aparatur desa, sehingga dapat pemerintahan desa sesuai No. 6 Tahun 2014 dan status kemajuan kemandirian	Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan		Lembaga Kemasyarakatan 5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan K di Wilayah Kecamatan
nya secara maximal pelayanan a ketentraman dan ketertiban rtajati termasuk Kawasan PKL n Lokal). PKL adalah kawasan ng berfungsi untuk melayani a kabupaten atau beberapa Selain itu juga Kecamatan a di jadikan sebagai pusat al dan umum, pengembangan an pengembangan kawasan a fungsi pelayanan tersebut ma berkembang, dan kehadiran nersial dan pengembangan	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang- undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Re Tentara Nasional Indonesia dan Instansi V Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh A Masyarakat

at dikendalikan, maka dengan ang lebih maksimal oleh sama pihak terkait lain (Polsek erta dengan lebih meningkatkan dan peran aktif masyarakat, apat memelihara ketenteraman n umum serta menegakan erundang-undangan sehingga asifitas di wilayah Kecamatan			
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan K dalam rangka Memantapkan Pengar Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhin serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya C Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan

dengan hasil telaahan diharapkan dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan agar dalam pelayanan Kecamatan tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

Karena Kecamatan Kertajati merupakan OPD yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

Peraturan Daerah tentang pemanfaatan ruang dan berkoordinasi dengan OPD dan stakeholders lain, serta lebih meningkatkan kettelibatan dan peran aktif masyarakat.

Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

Dalam penentuan Isu – Isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kertajati tidak lepas dan harus mengacu kepada Isu – Isu Strategis Kabupaten Majalengka, diantaranya terdapat 7 (tujuh) Isu Stratetgis Pembangunan Majalengka yaitu :

4. Kemandirian Desa
5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
7. Reformasi Birokrasi

Adapun Penentuan Isu Startegis Kecamatan Kertajati adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Kertajati adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kertajati.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan

5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Kertajati termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Kertajati akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian,

peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Kertajati.

adalah Meningkatkan Reformasi Birokrasi di Kecamatan.

1.2 Sasaran

Sasaran pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Kertajati adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Kertajati

	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Tahun	
								2024	2025
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	
				Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	
				Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	
			Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	
				Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	
				Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	
			Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kertajati

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun selama periode Rencana Strategis Kecamatan Kertajati Tahun 2024– 2026 . serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan Strategi agar selaras dengan RPD Kabupaten Majalengka serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Kertajati mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan Strategi juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun Strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Kertajati, sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan
			Meningkatkan Pelayanan Perkantoran
			Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa
			Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
			Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama
		Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka periode 2024-2026.

Adapun Rencana Program, Kegiatan yang terkait perencanaan Tahun 2024 dan 2026, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

Berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dibuat berdasarkan nomenklatur yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Adapun nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tercantum dalam Format Renstra Tahun 2024 – 2026 mencakup :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- b. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Sub Kegiatan Mewujudkan Stabilitas

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA – SKPD.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Sub Kegiatan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel .
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Selengkapnya secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka disajikan dalam Tabel 6 Renstra Tahun Anggaran 2024-2026

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (KECAMATAN)
KECAMATAN KERTAJATI
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)					
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	75	100	82	100	90	100	99	100	260		
			7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalinnnya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Kegiatan	17	3	19	3	21	3	23	6	63		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Event	17,2	17	18,9	17	21	17	23	34	63	Kesos	Kec. Kertajati
			7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	47	12	52	12	57	12	63	24	171		
			7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir	Dokumen	15,7	4	17,2	4	19,0	4	21	8	57	Kesos	Kec. Kertajati
			7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	kali	15,7	2	17,2	2	19,0	2	21	4	57	Kesos	Kec. Kertajati
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat	Bulan	15,7	12	17,2	12	19,0	12	21	24	57	PemYanum	Kec. Kertajati

			Kecamatan												
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak	Persen	10	100	11	100	12	100	14	100	26			
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi dan Monev PBB	Kali	10,3	4	11,4	4	12,5	4	14	8	38	PemYanum	Kec. Kertajati	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	31	100	42	100	46	100	51	100	97			
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan	persen	31	70	42	70	46	80	51	150	97			
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah potensi unggulan kecamatan	Jenis	10,0	2	11,0	2	12,1	2	13	4	36	PPM/Kesos	Kec. Kertajati	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah UMKM yang dibina	Kelompok	20,7	13	31,0	13	34,1	13	38	26	103	PPM	Kec. Kertajati	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	20	100	22	100	24	100	27	100	51			
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Skala Kecamatan	Kali	20	14	22	14	24	14	27	28	51			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan	Kali	10,5	12	11,6	12	12,7	12	14	24	38	TRANTIBUM	Kec. Kertajati	

			Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan) Forkopimcam												
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kali	9,5	2	10,5	2	11,5	2	13	4	35	Kesos	Kec. Kertajati
		7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	88	100	97	100	106	100	117	100	223		
		7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persen	88	100	97	100	106	100	117	100	223		
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Partisipasi Desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN	Desa	47,1	13	51,8	13	57,0	13	63	26	172	TRANTIBUM	Kec. Kertajati
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan PHBI dan MTQ	Event	40,7	4	44,8	4	49,2	4	54	8	148	Kesos	Kec. Kertajati
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	155	10	65	10	187	10	79	20	266		
		7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	155	4	65	4	187	5	79	9	266		
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	Kali	14,1	2	15,5	2	17,1	2	19	4	51	PemYanum	Kec. Kertajati

					Perangkat Desa												
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilainya Kepala Desa Definitif	Desa	95,9	0	0	115,1	3	-	3	115	PemYanum	Kec. Kertajati	
			7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Desa	kali	16,9	1	18,6	20,5	1	23	2	62	PPM	Kec. Kertajati	
			7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Lembaga/ Organisasi	12,2	3	13,4	14,8	3	16	6	44	PPM	Kec. Kertajati	
			7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Lomba Desa	Kali	16,1	1	17,7	19,4	1	21	2	58	Pem Yanun	Kec. Kertajati	
		JUMLAH									454		373				
PENUNJANG																	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2.634	BB	2.898	BB	3.188	BB	6.086		
					Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	64	B	70	B	77	B	147		
					Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	B	923	B	577	100	635	100	1.212		
		Capaian Sakip Perangkat Daerah			Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	29	BB	31	BB	35	BB	66		
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Renstra dan Renja	Persen	90 ≤	90	29	90	31	90	35	90	66		
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	4,0	2	4,4	2	4,8	3	5,3	5	15	KPEP	Kec. Kertajati
			X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Dokumen	2,0	1	2,2	1	2,4	1	2,7	2	7	KPEP	Kec. Kertajati
			X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen	2,0	1	2,2	1	2,4	1	2,7	2	7	KPEP	Kec. Kertajati

		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen	4,0	1	4,4	1	4,8	1	5,3	2	15	KPEP	Kec. Kertajati
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen	4,0	1	4,4	1	4,8	1	5,3	2	15	KPEP	Kec. Kertajati
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kali	4,0	1	4,4	1	4,8	1	5,3	2	15	KPEP	Kec. Kertajati
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	6,0	2	6,5	2	7,2	2	7,9	4	22	KPEP	Kec. Kertajati
				Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2.606	BB	2.866	BB	3.153	BB	6.020		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	90 ≤	90	2.606	90	2.866	90	3.153	90	6.020		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	2.363	12	2.599,3	12	2.859,2	12	3.145	12	8.604	KPEP	Kec. Kertajati
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jenis	2,0	1	2,2	1	2,4	1	3	1	7	KPEP	Kec. Kertajati
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Perangkat Daerah	Jenis	4,0	1	4,4	1	4,8	1	5	1	15	KPEP	Kec. Kertajati
		Capaian SKM Peringkat Daerah		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	64	B	70	B	77	B	147		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	Persen	78,50%	80	64	80	70	80	77	80	147		
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jenis	57,8	1	63,5	1	69,9	1	77	1	210	Kasubag Umum	Kec. Kertajati

					100	100	149	100	164	100	180	100	344		
					100	100	149	100	164	100	180	100	344		
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jenis	15,1	4	16,6	4	18,3	4	20	8	55	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	25,0	27	27,5	27	30,3	27	33	54	91	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jenis	20,0	15	22,0	15	24,2	15	27	30	73	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	37,2	12	40,9	12	45,0	12	50	12	136	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	15,0	5	16,5	5	18,1	5	20	10	55	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	12,9	2	14,2	2	15,7	2	17	4	47	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	10,0	12	11,0	12	12,1	12	13	12	36	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
					100	100	78	100	85	100	94	100	179		
					75	75	78	75	85	75	94	75	179		
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	Jenis	25,0	3	27,5	3	30,3	3	33	6	91	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	25,6	3	28,2	3	31,0	3	34	6	93	Kasubag Umum	Kec. Kertajati

		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis	20,0	2	22,0	2	24,2	2	27	4	73	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	564	100	182	100	200	100	382		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	100	564	100	182	100	200	100	382		
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	Bulan	71,4	12	78,5	12	86,4	12	95	12	260	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	79,0	13	86,9	13	95,6	13	105	13	288	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
										-				-		
				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,0	100	133	100	146,0	100	161	100	439		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	Persen	80,0	80	133	80	146,0	80	161	80	439		
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		29,9	2	32,9	2	36,2		40		109	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	Jenis	20,0	3	22,0	3	24,2	3	27	6	73	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Bulan	20,8	12	22,9	12	25,2	12	28	12	76	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	49,9	12	54,9	12	60,4	12	66	12	182	Kasubag Umum	Kec. Kertajati
								3.621		3.545		3.899		11.065		
								3.621		3.999		4.272		11.891		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrument penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Kecamatan Kertajati dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2024 Kabupaten Majalengka Tahun, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Kertajati Indikator Kinerja Kecamatan Kertajati dapat diuraikan sebagaimana tertuang pada terlampir dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
					2024		2025		2026					
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.		
KECAMATAN KERTAJATI														
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100,00	59,00	100,00	61,70	100,00	67,87	100,00	188,57	Kecamatan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100,00	50,00	100,00	54,00	100,00	59,40	100,00	163,40	Kecamatan
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100,00	30,00	100,00	32,00	100,00	35,20	100,00	97,20	Kecamatan

4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100,00	110,00	100,00	120,00	100,00	132,00	100,00	362,00	Kecamatan
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10,00	136,00	10,00	267,00	10,00	162,80	20,00	565,80	Kecamatan
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						3.389,00		3.587,00		3.945,70		10.921,70	
		1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah		Predikat	BB	2.907,00	BB	3.058,00	BB	3.363,80	BB	9.328,80	Kecamatan
		2.	Capaian SKM Perangkat Daerah		Predikat	B	10,00	B	11,00	B	12,10	B	33,10	Kecamatan
		3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Persen	100,00	472,00	100,00	518,00	100,00	569,80	100,00	1.559,80	Kecamatan

disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholders pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Kertajati dimana merupakan hal-hal yang ingin di capai selama kurun waktu lima tahun Tahun berdasarkan Analisis Aspek Strategi baik internal maupun eksternal, berupa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kertajati Tahun 2024-2026, Pembangunan di wilayah Kecamatan Kertajati dapat lebih terarah, terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna.

Demikian Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Kertajati untuk di pedomani aparatur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kertajati.

Camat Kertajati,

H. TRIS SUSENO, S.Sos.,M.MKes

Pembina Tk.I

NIP. 19650518 198903 1 010